



MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA BAIK KARENA FAKTOR AGAMA, SOSIAL, DAN ETNIS

Widyawati

IAIN Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo,
Jawa Timur 63492, Indonesia

widyaaa71@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang beberapa identitas nasional yang memiliki gambaran yang membahas tentang politik dan etnis. Pembahasan ini fokus pada dasar membedakan jurnal ini dengan sekripsi atau karya tulis yang sepadan. Sekripsi atau jurnal yang membahas tentang identitas politik banyak yang ikut serta dalam agama dan sekelompok marginal walaupun juga banyak terdapat masalah identitas politik dan etnis yang memiliki tekanan yang lebih pada identitas politik. Pada era reformasi, terdapat partisipasi publik yang semakin meluas dan bebas, di dalam penguatan identitas politik terdapat masalah baru yang hadir. Identitas politik di Indonesia menjadi lebih kuat dan menjadi pilar atas bergulirnya demokratisasi. Setelah selesai mengkaji dan juga menganalisis data, maka dari itu jurnal ini telah berhasil dalam mendapatkan hal-hal yang saling berkesinambungan dengan adanya penguatan dalam identitas politik dan etnis di Indonesia setelah adanya periode baru yang kontribusi antara beberapa pihak memiliki pengaruh, yang terdiri dari kekuatan modal sosial yang telah dimiliki etnis. Di lihat secara eksklusif dalam mendapatkan suatu tempat yang strategis dalam suatu politik baik formal ataupun secara tidak formal.

Kata Kunci: *Sistem Demokrasi, Politik Identitas, Agama, Sosial, dan Etnis*

ABSTRACT

This article describes several national identities that have an overview that discusses politics and ethnicity. This discussion focuses on the basis for distinguishing this journal from similar or equivalent papers. Many secretaries or journals that discuss political identity participate in religion and marginalized groups, although there are also many issues of political and ethnic identity that have more emphasis on political identity. In the reform era, there was widespread and free public participation. In strengthening political identity, new problems were present. Political identity in Indonesia has become stronger and has become a pillar for the rolling of democratization. After completing reviewing and analyzing data, this journal has therefore succeeded in obtaining mutually sustainable matters with the strengthening of political and ethnic identities in Indonesia after a new period in which contributions between several parties have had an influence, which consist of the power of capital sosial ethnic. Seen exclusively in getting a strategic place in a politics, either formal or informal.

Keywords: *Democraton System, Identity Politics, Religion, Social, and Ethnicity*

PENDAHULUAN

Indonesia masuk dalam Negara yang sudah merdeka dan wilayahnya yang sangat luas, sudah dipastikan memiliki identitas agar dapat dikenal dan menjadi pembeda dengan Negara lain. Identitas nasional bisa menjaga kelangsungan dan eksistensi hidup suatu Negara. Maka Indonesia memiliki wibawa dan kehormatan selaku Negara yang setara dengan Negara lain. Identitas nasional digunakan Indonesia sebagai jati diri Negara dari proses kebangsaan yang cukup panjang yaitu semenjak terjadinya masa penjajahan hingga sampai pada masa kemerdekaan.

Tetapi karena adanya perubahan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang inhere dalam melakukan perjalanan sejarah untuk menjadi bangsa, dimana tidak mungkin akan terlepas dari konteks berubahnya global dalam perkembangan internasional. Dimana perubahan global ini dilihat dari fukuyama akan dibawa ke perubahan ke ideologi particular kearah ideology universal, dan kondisi inilah kapitalis akan menguasainya. Untuk menghadapi adanya perubahan ini sangat bergantung terhadap kemampuan Negara untuk melawannya.

Dalam Satu Negara untuk melawan pengaruh dari budaya asing akan ada responded an challenge. Apabila challenge memiliki nilai lebih besar dari response bisa dikatakan bangsa tersebut tidak akan mengalami perkembangan dan tidak menjadi Negara kreatif. Maka dari itu agar Negara Indonesia masih tetap ada untuk melawan adanya globalisasi harus tetap membawa kejunjungan tinggi tentang identitas nasional dimana menjadi kepribadian Negara Indonesia yang menjadi dasar perkembangan kreativitas budaya yang globalisasi.

Satu Negara akan memerlukan identitas nasional ataupun jati diri yang berfungsi sebagai penanda dan pengenalan karakter dari Negara tersebut ke Negara yang lain. Satu Negara juga bisa disebut sebagai Negara apabila telah melaksanakan satu identitas nasional atau melakukan pencarian jati diri Negara, karena dengan adanya Negara lain mengakui bahwa setiap Negara di dunia ini mempunyai identitas sendiri yang sesuai dengan sifat, ciri-ciri, keuntungan dan memiliki ciri khas dari suatu Negara.

Penentuan identitas nasional Negara Indonesia, apabila hanya menyebutkan ciri khas fisik saja sangatlah sulit. Diketahui bahwa bangsa Indonesia ini memiliki beranekaragam unsur budaya, ras, dan agama juga memiliki kepribadian yang dari awal memiliki beberapa perbedaan. Cara yang digunakan Untuk mendapatkan pengetahuan tentang identitas

nasional serta karakter Negara Indonesia tidak banyak di fahami melalui cara statis tetapi harus memahami juga melalui pembahasan dinamis. Identitas nasional tidak hanya terdapat pada undang - undang dasar 1945 tetapi termasuk juga kedalam undang-undang nomor 24 tahun 2009, harus lebih mendalam melalui filosofis yang menjadi pembeda Negara Indonesia dan Negara lainnya (Tatu Afifah, 2018. 188).

Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior ataupun antara mayoritas dengan minoritas. Tidak terkecuali di Indonesia, pemahaan mengenai demokrasi liberal yang mengagungkan pancasila di atas segalanya menjadikan agama sebagai substansi yang keberadaannya dianggap sebagai ancaman bagi keragaman yang ada di Indonesia terutama terhadap agama minoritas (Yeni Sri Lestari, 2018). Hal positif yang dapat diambil dari politik identitas adalah ada upaya untuk tetap melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan, sehingga penguatan akan budaya tidak akan luntur dan hilang (Muhammad Habibi, 2018). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan multikulturalisme di Indonesia, maka identitas nasional, etnis, dan agama memainkan peran yang sangat penting (Tutut Chusniyah, 2016).

Era politik kontemporer saat ini, politik identitas mengancam sikap nasionalisme dan pluralisme yakni sebuah realitas kegamangan yang dialami bangsa Indonesia terkait menguatnya politik identitas (Zahrotunnimah, 2018). Pembentukan identitas dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. Hal ini yang akan dapat melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, sosial itu sendiri dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial. Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya (Sukamto, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode *library research*. Data-data dalam penelitian ini diambil dari sumber kedua, yaitu sumber buku-buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan opini media cetak lokal yang ada di Indonesia yang diambil melalui *website* dan sumber dokumen

tertulis lain, yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk bisa dianalisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan sumber tertulis lain. Yang dimaksud dengan sumber tertulis lain ialah sumber yang bukan dari internet tetapi sumber tersebut terkait dengan masalah penelitian. Media cetak, website, dan sumber dokumen tertulis lain dianalisis melalui pendekatan konten analisis data yang kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan, dimana sumber data yang digunakan meliputi sumber kepustakaan, dokumen, dan informasi. Sumber penelitian ini adalah keadaan politik identitas saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi semakin mengalami peningkatan yang cukup drastis karena dimaklumi dari berbagai pihak pemerintahan di Indonesia, justru kenyataannya pemerintahan tidak selalu memberikan keadilan pada masyarakat. Dalam hal ini digunakan untuk menjadi penjamin hak yang seharusnya dimiliki warga Negara, jadi setiap individu memiliki kebebasan didalamnya. Pada dasarnya Indonesia terus bertahan dengan perbedaan tentang keanekaragaman yang dapat mengakibatkan suatu kelompok mengalami perpecahan.

Faktor utama yang menjadi pemicu konflik keragaman di Indonesia seperti konflik antar etnis, konflik budaya, dan konflik antar keyakinan. Konflik tersebut memicu timbulnya konflik antara individu dengan individu yang lainnya. Pemicu tersebut bertambah rumit setelah datangnya suatu kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme sebagai anggapan rasa toleransi atas kemerdekaan yang di raih oleh Indonesia. Identitas etnik, ras, keyakinan, dan adat istiadat yang di dominasi oleh kelompok nasionalis.

Perselisihan yang terjadi antara nasionalis dan keyakinan semakin mengganggu kesetabilan Negara. Perbedaan pemahaman antar kelompok mengenai identitas politik dapat melahirkan isu baru di kalangan masyarakat, yang di sebabkan hadirnya persuasi dan tuntutan antar kelompok terhadap kebenaran identitas yang mereka yakini dengan munculnya kelompok pro pemerintah dan kelompok anti pemerintah. (Yeni sri lestari, 2018. 20-21).

Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme Di Indonesia

Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berada di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun. Baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam setudi pasca kolonial , pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau di geluti sejak lama.

Kontribusi dalam hal ini yaitu telah meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budayanya. Sedangkan dalam literatur ilmu politik, politik identitas betul betul di pilah untuk membedakan dan memperlihatkan perbedaan yang sangat jelas mengenai apa itu politik identitas dan apa itu identitas politik. Identitas politik sendiri merupakan suatu kontribusi yang menentukan posisi kepentingan subjek. Sedangkan politik identitas merupakan suatu yang mengacu pada mekanisme politik, pengorganisasian identitas, baik dalam identitas politik maupun identitas sosial.

Politik identitas di pahami bahwa dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian terlihat dalam praktik politik mengalami kemajuan. Apalagi menjelang pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Indonesia melalui agenda besar bernama PEMILU. Salah satu pakar politik yang bernama Donald L Morowitz (1998) merupakan salah satu pakar politik berasal dari Universitas Duke telah mendefinsikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa saja yang akan di ikut sertakan dan siapa yang akan di tolak.

Suatu garis penentuan tersebut tidak bisa di rubah maka setatus baik sebagai anggota mauapunakan terlihat bersifat permanen. Agnes Heller (Abdillah, 2002:22) menggambarkan terkait politik identitas dalam hal ini yang di fokuskan pada suatu pembedaan, dimana suatu kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermainwalau akhirnya memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etis. Sehingga pada akhirnya politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, politik isu lingkungan, dan perselisihan etnis

Nasionalisme muncul sebagai akibat dari banyaknya tanggapan terhadap industrialisasi keterceraian orang-orang dan rupa-rupa ikatan primordial kepada kkerabatan, agama dan komunitas lokal. Dalam catatan suatu sejarah Indonesia dikatakan, bahwasanya peran ideology

nasionalisme dalam politik di Indonesia sendiri di mulai oleh swkelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi budi utomo. (Zahrotunnimah, 2018. 93)

Politik identitas di Indonesia sebagian di kutip dalam bukunya politik identitas dan masa depan pluralism Indonesia , di jelaskan bahwa kasus di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan etitas, agama ideology dan kepentingan kepentingan lokalyang di wakili pada umumnya oleh para elit politik dengan artikulasi masing-masing. Tentu sangat berbeda pemahaman sejarah nasionalisme di Indonesia dahulu, yang awal mulanya merupakan sebuah ideology, sebgai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang di mulai dengan penerbitan Koran medan prijaji milik pengusaha pers dan jurnalis pribumi pertama R.M. Oleh karena itu, jika di amati atau di lacak dari sejarah Indonesia politik identitas yang muncul cenderung bermuatan entitas, agama dan ideology politik. Dengan kondidsi Indonesia yang multikulturalisme, maka politik identitas dapat menjadi bahan kajian yang dapat di telaah.

Politik Identitas dan Penguat Demokrasi Lokal

Budaya politik lokal yang sekarang berkembang di Indonesia merupakan warisan sosial yang sudah terbentuk sejak berjalanya sejarah di Indonesia. Budaya terbentuk dari beberapa bagian yaitu kepercayaan, kebiasaan, dan struktur soial yang berkesinam bungan dengan kehidupan politik masyarakat. Adapun batasan terdapat dalam budaya tersebut dapat berasal dari agama, adat istiadat dan juga norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Budaya tersebut juga dapat dilihat dari condongnya perilaku masyarakat pada kehidupan politik di dalam masyarakat tersebut.

Budaya politik lokal yang berkembang di Indonesia juga memiliki tanggapan adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Budaya tersebut mendapat pengaruh dari sistem kultural dan kepercayaan atau agama. Dengan berkembangnya sekelompok komuitas tradisional pada budaya tersebut didalamnya terdapat nilai-nilai positif yang cocok dikembangkan dan dapat dipertahankan dalam pengelolaan sistem birokrasi lokal di daerah.

Pada sistem politik juga akan memberi pengaruh kebudayaan pada setiap daerah, dan berpengaruh juga terhadap bagaimana pola birokrasi yang telah dilaksanakan dan sistem demokrasi, Sistem demokrasi lokal merupakan gambaran bagi budaya politik suatu daerah, dan juga menjadi aspek paling penting karena sistem birokrasi berpengaruh pada seluruh

bidang kehidupan politik di masyarakat. Budaya demokrasi tersebut memiliki hubungan antara budaya politik lokal yang kuat, pertama birokrasi merupakan badan politik, yang ke dua budaya demokrasi mempunyai peranan penting dalam upaya memahami golongan atas dalam politik.

Yang ketiga keberhasilan merupakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh peranan sistem birokrasi yang dijalankan setempat. Beberapa dalih yang utarakan oleh para informan terkait ada tidaknya suatu tindakan lokal yang dapat mengubah suatu sistem politik lokal, beberapa anggapan melihat bahwa nilai lokal yang masih banyak di gunakan oleh masyarakat. Namun mereka tidak belum percaya atau masih meragukan hal tersebut yang di dasari dengan anggapan bahwa sistem politik yang di gunakan saat ini sudah melupakan hal- hal yang bersifat lokal, seperti tata kelola dan penyelesaian masalah .dalam politik lokal ini menjuru pada sistem tata kelola yang di junjung oleh masyarakat dunia.

Adanya banyak rasa kurang percaya terhadap golongan atas terhadap politik lokal yang masih menjual berita-berita nilai yang lokal guna untuk mendapatkan belas kasih dari warga lokal, di beberapa daerah masih kuat unsur-unsur nilai yang tinggi yang masih kental di kalangan masyarakat. Kesimpulan dapat di ambil bagaimana nilai lokal keutamaan yang sangat memungkinkan suatu perubahan dalam suatu sistem politik. Dampak yang besar dapat mempengaruhi suatu sistem birokrasi yang berada di suatu daerah.

sehingga tidak bisa di hindarkan ketika budaya birokrasi dan budaya politik di setiap daerah itu berbeda tergantung perkembangan budaya politik .berdampak pada pola pikir elit lokal. Yang di percayai oleh masyarakat lokal adalah nilai-nilai kultural, juga sangat berakibat pada pola pikir kelompok atas yang lokal. Ada kejadian di beberapa daerah bahwa melihat penguatan politik identitas di ranah lokal dapat merubah suatu sistem politik. Habodin, Muhtar (2012), memberikan suatu gambaran di beberapa daerah dengan adanya berita lokalisme dapat mengakibatkan menggiyangnya kesetabilan pemerintah.

Dengan adanya berita putra daerah yang harus memimpin dalam suatu daerah membuat beberapa perubahan dalam pemerintahan. Di masa orde baru kepemimpinan di pimpin oleh putra daerah semua di kuasai dan di tentukan oleh pusat, adapun pergerakan yang di lakukan oleh pra kelompok atas lokal. Adapun tingkat kesenjangan masyarakat relatif rendah. Bahwa dalam arena pertarungan tidak dapat di pungkiri

lagi seperti Indonesia yang saling beradu domba, berlomba untuk mendapatkan apa yang di inginkan.

Kelompok atas tentu memanfaatkan situasi ini dimana yang turut menikmati yaitu masyarakat kelas ke bawah, masyarakat berpartisipasi dalam politik yang di gerakkan oleh uang dan menjadi demokrasi Indonesia sebuah rimba politik. Di sini yang banyak uang dialah yang paling menang. Tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi jaminan bagi kemajuan bangsa kedepanya. Feodalisme di Indonesia digunakan merujuk pada perilaku yang kurang baik sama dengan perilaku yang kolot, di mana mereka selalu ingin di hormati kemudian bertahan dalam nilai norma yang telah lama di tinggalkan.

Dengan adanya feodalisme menjadikan masalah enggan untuk mengeluarkan pendapat dan mungkin pemikiran yang berbeda apa lagi bertentangan dengan pemikiran orang yang di anggap lebih tinggi jabatannya atau kedudukanya.sebaliknya orang begitu mengabaikan terhadap orang yang di anggap mempunyai posisi yang di nilai lebih rendah dari pada posisinya sendiri. Yang menempati grafik puncak peringkat pola kepemimpinan di Indonesia yakni structural maupun kultural.

Di mana structural dan kultural memposisikan hubungan secara vertikal atara sesama manusia.Sikap putus asa dan skeptis terhadap demokrasi. Penganut teori konspirasi memandang apapun yang ada di dunia ini sudah dirancang sedemikian rupa dan masyarakat dunia menjadi korban atas skenario besar. Demokrasi yang yang di anggap menjadi skenario yang di tawarkan. Masyarakat barat berpendapat yang melahirkan demokrasi mempunyai budaya berbeda budaya Indonesia, bahwa budaya berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi yang benar.

Setiap budaya dapat dikembangkan oleh demokrasi, kemudian demokrasi tidak akan persis sama dalam lingkungan budaya yang berbeda. Contohnya demokrasi di jepang dan amerika sangat berbeda, jangankan antara budaya barat dan timur demokrasi di inggris dan perancis saja berbeda.Diidentikan bahwa politik praktis memilih kepala daerah yang secara langsung , pemilihan yang di lakukan secara langsung dapat menimbulkan banyak efek, saat itu jalan yang paling baik untuk repressi masyarakat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih langsung oleh DPRD.

Penyelenggaraan hukum pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah. Pemilu di selenggarakan memilih wakil rakyat parlemen ataupun pemimpin eksekutif tingkat

nasional dan lokal seperti presiden dan gubernur. Praktis politik dilakukan oleh setiap politisi yang memberikan kesan yang beragam terhadap masyarakat, janji yang diberikan oleh politis beragam yang mendapat balas kasian dari masyarakat dan mendapatkan apresiasi di tengah-tengah masyrakat.

Dalam penyelenggaraan pemilu harus betul di awasi semua pihak, dan harapan terselenggarakan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu pemilu juga harus di selenggarakan dengan taat pada asas kepastian hukum, tertip penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan efisiensi, dan efektivitas. Masyarakat mempertimbangkan dalam pemilihan calon pemimpin dengan pertimbangan orang tersebut memiliki perhatian jelas kepada konstituenya tentang perhatian mereka terhadap pemberdayaan orang dan nilai lokal dalam satu acuan dalam memilih, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam memilih menjadi wakil mereka di pemerintahan. Responden mempercayai banyak alasan eksekutif maupun legislative (M. Sirajudin fikri, Nico Oktario A, 2018. 173-17).

Kebangkitan Politik Identitas Islam

Pendekatan pertama, mengargumentasikan primordialisme untuk melihat fenomena agama yang terdapat di dalam kategori sosio-biologis. Dalam pandangan ini di jelaskan bahwa suatu kelompok sosial dikarakteristikan oleh wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang tidak bisa di bantah. Sedangkan secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas.

Secara definitif para penganut paham primordialisme menekankan pada upaya pencapaian kepentingan yang kolektif untuk di jadikan definisi dan mengartikulasi pandangan secara umum sekaligus untuk membentuk visi untuk masa depan. Pendekatan konstruktifis yang di kembangkan oleh frederik barth. Suatu teori yang memandang suatu identitas agama dan budaya, sebagai hasil dari proses yang kompleks, dan batas-batas yang sangat simbolik kemudian dibangun oleh manfaat mitologi yang situasi kondisi dan tujuan yang ingin di capai. (Endang sari, 2016. 149).

Persaingan Identitas Ekonomi-Politik, Agama dan Etnis

Dalam permasalahan demokrasi harus memperhatikan beberapa faktor yang memiliki keterkaitan dengan faktor ekonomi yang ikut mempengaruhi berjalannya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejarah nusantara agama islam menjadi mayoritas yang diyakini penduduk Indonesia yang dibawa oleh pedagang arab pada tujuh masehi setelah Indonesia dikuasai india di abad pertama masehi. Kedatangan pedagang india dan arab ke Indonesia yang menjadi pemicu pertama padatnya penduduk di Indonesia dan sampai saat ini semakin berkembang.

Pada masa penjajahan pedagang tionghoa, india dan arab mempunyai peran besar dalam perdagangan di Indonesia, dan yang paling utama terletak di Batavia. Alasan orang cina datang dan menetap di Indonesia untuk menjadi buruh dan pekerja yang di pimpin oleh VOC dan Inggris, lalu orang cina di angkat sttus sosialnya sederajat dengan orang india dan arab oleh belanda yang menjadi penghubung perdagangan dengan Indonesia. Wilayah yang menjadi Pusat perdagangan dan perekonomian para imigran yaitu Jakarta.

Wilayah di Indonesia sebagian diduduki oleh keturunan orang cina, dan diikuti oleh keturunan arab dan india. Keturunan cina dan arab sudah memiliki wilayah sendiri di Jakarta. Kawasan wilayah tersebut di beri nama pecinan. Wilayah yang dipercayai oleh cina untuk ditempati sebagai jalur naga mulai dari Kepala Gading, Sunter, Keramat, Luar Batang, dan Pluit di Jakarta Utara, sampai di Glodok, dan di Jakarta Barat. Bangsa arab mempunyai wilayah sendiri yang terdapat di Condet Jakarta Timur dan Negara India banyak menempati rumah susun Bandar kemayoran Jakarta pusat sebagai tempat tinggal.

Dari segi pendidikan orang Indonesia memilih alasan yang lebih rasional mendidik dan kritis. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya 45-50% berpendidikan SLTA dan wilayah sekitar berjumlah 20-25% berpendidikan perguruan tinggi. Survei yang sudah diterbitkan ke public relatif menandakan bahwa faktor suku dan agama tak terlalu berpengaruh. Identitas suku dan agama yang paling utama adalah faktor yang bersifat latin, dan itu semua ada pada masyarakat terutama masyarakat multi kultur seperti Jakarta. Digunakan atau tidak dan berpengaruh atau tidak tergantung pada sejumlah kondisi. (Hanifiya, 2018. 40-44).

Politisme Agama Sebagai Sebuah Fenomena Politik Pasca-Kebenaran: Antara Populisme, Distorsi, Informasi, dan Legitimasi

Pada realitas populistik tidak mungkin jauh dari era pasca-kebenaran. Pembahasan yang dibuat dalam kompetisi politik digambarkan adanya berita-berita tentang menjunjung tinggi hak masyarakat. Jansen (2015) berpendapat bahwa perilaku individu yang menjunjung tinggi hak adalah integritas politik didalamnya ada tokoh-tokoh politik dapat mengarahkan integritas sosial yang tersisihkan lalu menciptakan integritas yang bisa secara giat melaksanakan praktik politik benar adanya dan perdebatan. Dalam hal ini komponen penting yang menjunjung tinggi yaitu mengarahkan dan terkait.

Menjunjung tinggi hak memiliki ciri yang bertabiat normal. Yang pertama yaitu kemampuan yang memiliki arti keadaan yang mewakili dari integritas dapat meninggalkan, yang kedua adalah ada tokoh yang mempunyai kekuasaan, lalu yang ketiga rasa integritas sosial sangat kuat, bisa diketahui melalui kondisi dimana yang seringkali diajukan beberapa pelaku yang berfungsi sebagai 'kita dan mereka' dimana ada batasan suatu integrasi dengan integrasi lainnya, integrasi disini memiliki tabiat yang menghasilkan perbedaan.

Berita tentang menjunjung tinggi hak yaitu berita yang sama dengan keperluan masyarakat umum. Berita tersebut bukan hanya berita yang dipahami oleh kalangan sosial tertentu saja. Berita tentang menjunjung tinggi hak sering kali mengungkapkan berita yang menyangkut keinginan hidup individu banyak. Dengan adanya hal tersebut maka, berita menjunjung tinggi hak sangat mudah mencapai pengertian dan juga selisih massa dari masyarakat umum.

Berfungsi sebagai eksemplar, yang dinamakan gerakan 2019 ganti Presiden ydimana menjadi gerakan yang awal mulanya dibangun sebagai *wake up call* dan peringatan utama tentang "kishruhnya" pemerintahan pada saat ini. Salah satu pembuat gerakan ini yaitu Mardani Ali sera mengatakan *Wake up call* terhadap masyarakat yang beragama muslim di Indonesia supaya tidak berdiam diri saja dalam hal berpolitik menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Dengan cara penggunaan kebijakan agama, tidak hanya doktrin-doktrin primer yang ada pada Al-Qur'an ataupun Hadist yang sering kali diambil untuk memperkuat pertahanan kebijakan yang mereka kemukakan.

Para pembangun geraka 2019 Ganti Presiden sering memberikan berita-berita yang menjunjung tinggi hak. Fakta-fakta yang diberikan terhadap masyarakat umum biasanya fakta yang kondisinya terpotong-

potong dan tidak memiliki keseimbangan. Kondisi 2019 Ganti Presiden secara umum pengembangan agama bukan hanya untuk alat politik, tetapi juga untuk mengeluarkan berita-berita politik yang dimana Indonesia menjadi Negara yang *bahaya*. Selain hal tersebut berita tentang hutang Negara, adanya berita yang membuat keadaan bersifat politis yang dimana terdapat fakta persial yang dilihat dari sisi hutangnya saja tetapi sisi yang lain tidak dilihat.

Selain berita tentang tingginya hutang Negara, berita yang membuat keadaan Indonesia bersifat politis yaitu tingginya tingkat tenaga kerja asing yang memiliki pekerjaan diindonesia, padahal jika dilihat dari data statistik surveinya mengatakan bahwa prevalensinya sangat sedikit kemungkinannya jika dibandingkan dengan banyaknya tenaga kerja domestik. Kebijakan presiden dalam mempermudah visa dari tenaga asing dianggap oleh beberapa pihak sebagai bukti presiden berpihak pada tenaga kerja asing. Perbincangan yang diberikan gerakan 2019 Ganti Presiden menuju pada proteksionistik, yang memiliki sifat SARA, dan menghidupkan kembali sistem masyarakat warga Negara dan bukan warga Negara.

Hidupnya kembali pembahasan proteksionis ini sama dengan pembahasan populis Trump dimana hal tersebut menjanjikan bahwa amerika akan bangkit di gunia dengan melaksanakan kebijakan proteksionis dan diskriminatif, dengan cara melaksanakan legitimasi yang cukup subjektif yang mereka anggap sama dengan kepentingan politik mereka.

Aturan informasi juga menjadi salah satu yang mebuat mengerucutnya berita tentang semakin tingginya harga BBM. Banyak media islami yang menjunjung tinggi hak masyarakat terkait kampanye politik milik jokowi tentang kenaikan harga BBM. Dan sebenarnya fakta yang ada yaitu tingginya harga BBM terjadi pada varian BBM pertamax saja yang berfungsi untuk bahan bakar kendaraan kelas sosial yang menengah ke atas. Presiden ditimpakan tuduhan tidak mendukung rakyat kecil. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses informasi di era pasca-kebenaran pada saat ini, argument parsial semacam ini sangat mudah viral dan masyarakat umum sangat mudah mempercayai berita tersebut.

Dari pengumpulan masalah-masalah yang memiliki keterkaitan kebijakan sosial dan politik jokowi akhirnya mengikuti gerakan 2019 Ganti Presiden dan menjadi narasi dalam gerakan tersebut tidak hanya fakta yang berhubungan tetapi ketika membacakan narasinya

menggunakan dalil-dalil dimana secara sistematik masuk dalam dalil-dalil tanda bahwa sudah memasuki akhir zaman. Narasi yang disampaikan dalam sosial media instagram menggunakan teger 2019 Ganti Presiden. Tindakan seperti ini merupakan menjadi mentalitas pasca- kebenaran, dimana fakta parsialnya dan opini emosionalnya lebih menonjol dari pada fakta objektifnya (Budi kurniawan, 2018. 145).

Yang menjadi pedoman penunjang kepentingan politik yaitu legitimasi, dalam pembahasan ini yaitu untuk tidak memilih jokowi kembali menjadi presiden jika mencalonkan diri lagi menjadi pemimpin pada tahun 2019. Agitasi dan propaganda politik dijadikan satu dalam bentuk subjektifitas fakta seperti gambaran realitas politik pasca-kebenaran di Negara Indonesia. Yang menjadi poin penting dalam menarik perhatian masyarakat umum dalam mempropagandakan gerakan tersebut dengan menggunakan instrumentalisasi agama.

Tidak hanya berita agama saja tetapi etnisitas dan rumor juga menjadi perbincangan dalam media sosial. Munculnya berita ini membuat timbulnya pertanyaan genealogi etnisitas dan ideology jokowi yang berkaitan dengan komunisme. Gater ganti presiden juga menjadi propaganda berita tentang bangkitnya komunisme yang hadir di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih mengalami trauma akibat peristiwa G30S hingga saat ini masih menjadi perdebatan diskusi dikalangan para sejarawan, dipolitisasi dan dieksploritas nalar untuk sebagai kepentingan politik praktis.

Lepas dari interpretasi masyarakat Indonesia yang memiliki kaitan dengan komunisme dimana masih terasosiasikan dengan menggunakan ateisme. Peristiwa ini menghasilkan keuntungan individu yang masuk dalam kelompok islamis, dimana masyarakat Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan politik Negara. Dengan adanya hal tersebut berita tentang ideologi dicampurkan dengan interpretasi sosial-agama yang menjadi strategi politik untuk kelompok oposisi kepada golongan nasionalis.

Adanya penggunaan pola kasus-kasus yang ada, dapat dilihat bahwa politisasi agama di Indonesia pada saat ini politik dapat dilacak menggunakan analisis pasca-kebenaran. Analisis untuk realitas politik yang ada saat ini bisa menggunakan konsep popualisme yang di kolaborasi dengan informasi distortif, persial maka akan menjadi legitimasi akibat politisasi agama dimana dilakukan para kaum yang berkepentingan. Hal ini berhubungan dengan pengalaman Negara

Indonesia dalam kasus politisasi agama yang terjadi dalam Negara tersebut (Budi Kurniawan, 2018. 145-148).

Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta

Secara teoritis politik identitas merupakan ssuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, di mana keberadaanya bersifat laten dan potensial dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Momentum pilkada yang berada di Jakarta telah memperlihatkan beberapa berita yang berkaitan dengan kampanye yang mana kampanye tersebut menguras energi bangsa bukan hanya publik Jakarta akan tetapi juga melibatkan masyarakat Indonesia, diantaranya kasus yang berkaitan dengan surah Al Maidah ayat 51 yaitu pada sebuah organisasi masyaraat di berbagai daerah di Indonesia dating ke Jakarta untuk melakukan aksi demo, karena adanya opini yang mengatakan bahwa 'Saya Muslim, saya memilih pemimpin yang muslim'.

Orang muslim pada saat itu menjadi pusat perhatian karena orang muslim memilih pemimpin harus muslim. Orang muslim tersebut akhirnya menjadi salah satu orang yang sedang menjadi tema perbincangan di publik dalam pemilihan gubernur Jakarta yang di umumkan di setiap jumat dan juga pada berbagai kegiatan keagamaan. Akhirnya banyak kalangan yang memberi kesimpulan bahwasanya Indonesia mengalami konflik baru diantaranya negara dan agama, yang utama berkaca pada tingginya politik dalam pemilihan gubernur di Jakarta.

Kasus yang pertama yaitu perdebatan yang menyinggung relasi agama dan negara yang sekarang sedang terjadi dan di perdebatkan oleh dua tokoh yang menjadi imbas dari polemik di awal kemerdekaan. Perdebatan yang dilakukan keduanya yaitu tentang negara Republik Turki tahun 1923, soekarno memuja kemunculan Mustafa Kamal Atatuek karena menjadi lambang modernisasi islam, yang mana dapat menjadi pemisah antara agama dan negara dan menurut Natsir itu menjadi kesalahan. Pada tahun 1940 mereka melakukan perdebatan lewat catatan di majalah panji islam.

Dalam golongan nasionalis sekuler yang di jadikan sebagai wakil yaitu Soekarno dan pada golongan nasionalis islami Natsir yang dianggap sebagai wakil. Menurut pandangan dari golongan nasionalis sekuler menjadi wakil bahwasanya agama harus di pisahkan karena yang di ajarkan dalam agama tidak dapat menuntaskan rumitnya masalah negara.

Dalam golongan ini yakin bahwa hanya ritual yang di butuhkan agama bukan urusan kebijakan. Dalam keyakinan kelompok nasionalis islami bahwasanya agama dan negara tidak dapat di pisah di karenakan urusan agama terikat dengan persoalan di negara. Di dalam kelompok ini tidak semua hubungan yang di jalin antara manusia dengan tuhanya dan juga urusan manusia dengan manusia menjadi urusan agama di dalam sebuah politik di negara.

Pada sidang tim 9 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa di sebut dengan (BPUPKI) melanjutkan perdebatanya yang terdiri dari beberapa anggota yang membahas tentang islam itu di perlukan atau tidak dalam dasar negara. dalam perdebatan tersebut mencetuskan 'pagam jakarta' yang telah di catat dalam sejarah pada tanggal 22 juni 1945 yang telah menjadi gagasan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pancasila yang menjadi dasar negara, dengan menghapuskan poin pertama yang di dalamnya terdapat kewajiban pelaksanaan syariat bagi para pemeluknya yang telah melampaui perdebatan yang sangat sulit.

Kasus yang kedua membeberkan tentang konflik antara negara dengan agama dan adanya kehadiran Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949 yang mula-mula di munculkan oleh teman indekos Soekarno dan Kartosuwiryo. Negara Islam Indonesia di kenal dengan sebutan Darul Islam atau biasa di sebut DI yang mempunyai arti Rumah Islam Gerakan ini mempunyai tujuan Indonesia di jadikan sebagai negara teokrasi dan islam menjadi dasar negara. proklamasi telah menegaskan bahwasanya " Hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia adalah Hukum Islam ", dan telah di cetuskan dalam Undang-Undang bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan juga "Hukum yang paling tinggi yaitu Al Qur'an dan Hadist".

Dalam proklamasi di Indonesia telah ditegaskan dengan menyatakan adanya kewajiban negara dimana Undang-Undang yang menjadi landasan syari'at islam serta perlawanan terhadap ideologi selain Al-Qur'an dan Hadist Sahih yang biasa disebut dengan "HukumKafir" yang mempunyai keterkaitan dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah, ayat 145. Kasus yang ketiga yaitu momentum dengan munculnya beberapa partai islam yang menjadi tanda sejak periode baru tahun 1998 yaitu Partai Keadilan, PBB, Partai Persatuan, PPP, Masyumi, PNU, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Cinta Damai (PCD), Partai Abut Yatama (PAY), PSII-1905, PAN, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), PKB.

Walaupun partai islam tersebut tidak mendapat voting terbesar, akan tetapi kaukus poros yang mereka lalui telah menghalangi aliran dan sejumlah politikus nasionalis serta koalisinya dan juga beberapa tokoh utama yang muncul pada posisi yang strategis pada suatu badan eksekutif dan legislatif. Amin Rais yang menjadi ketua DPR-RI sekaligus Gus Dur sebagai presiden. Pada era reformasi merupakan yang memungkinkan adanya keterbukaan orang yang mengekspresikan termasuk keberagamaan. Dengan di tandai dengan sejumlah ormas islam yang melakukan penegakan syariah.

Selain sangat kental dengan simbolnya yang lebih mengandalkan gerakannya intik unjuk kekuatan untuk melawan suatu hal yang tidak di jumpai banyak orang sebelumnya, dan yang dirugikan atas pembenaran dan tindakan yang mengatasnamakan dirinya sebagai agama yang dapat menarik gerakan organisasi yang mampu menarik perhatian media massa dengan sangat luas. Sejak inilah islam banyak di kenal lebih pada gerakannya di Indonesia. Di orde baru jatuhnya pemerintahan yang otoriter korup membawa harapan yang memunculkan pemerintahan pada masa orde baru yang demokratis, hal tersebut mencerminkan kebebasan mendirikan partai politik.

Secara umum partai politik islam setelah reformasi mempunyai dua aliran yang berbeda tetap saling bertentangan, aliran yang pertama menganut bahwa syariah islam harus di terapkan dalam pemerintahan. Partai besar yang terlibat adalah partai bulan bintang, partai keadilan sejahtera, partai persatuan pembangunan. Aliran kedua menolak syariah islam dalam sistem pemerintahan. Aliran ini dianut oleh dua partai islam yang cukup besar yaitu partai amanat nasional dan partai kebangkitan bangsa. Untuk babak selanjutnya pilkada Jakarta memomentum ke keawatiran sebagian kalangan, simbolisasi dari kebangkitan politik identitas agama dan gerakan islam Indonesia dan negara yang akhirnya memenangkan pilkada.

Primordialisme mengargumentasikan fenomena agama dalam kategori sosio-biologis, pandangan ini berpandangan bahwa suatu kelompok sosial di karakteristik oleh gambaran wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial. Pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama. Para penganut paham primordial menekankan upaya pencapaian kepentingan yang kolektif dan identitas kolektif untuk mendefinisikan pandangan umum saat ini. Pandangan primordial mengemukakan bahwa kepentingan antara individual anggota agama di buat untuk menunjang kepentingan kelompok dan

pimpinannya untuk memperkuat agama sebagai sumber kekuatan sosial (Endang sari, 2018. 145-150).

Identitas Nasional Sebagai Pertimbangan Politik Indonesia Dalam Merespon Aksi Terorisisme

Berita terorisme pada saat ini semakin mengalami perluasan tidak hanya satu Negara tetapi sampai mancan Negara yang membuat penyebaran teroris semakin berkembang pesat lalu menjadi peristiwa global. Penyebab dari peristiwa ini karena adanya masa globalisasi yang mengakibatkan modal, aliran dan para masyarakat mengalami percepatan dalam jaringan teroris. Dalam globalisasi bukan hanya membahas tentang mobilitas barang dan masyarakat saja tetapi membahas tentang pemikiran atau ide baru. Arus globalisasi juga membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mendorong perkumpulan orang bahkan individual untuk mengikuti pemanfaatan keadaan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Globalisme tidak hanya memberikan kemudahan untuk kebutuhan masyarakat tetapi juga mencetuskan hal yang tidak adil dalam distributive sehingga kejadian ini digunakan untuk dorongan terhadap tindakan fundamentalisme-terorisme. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong penyebab munculnya tindakan terorisme ialah agama yang sering kali dijadikan legitimasi perlawanan dengan cara meneror. Meskipun tidak selalu menjadi penyebab utama ada faktor lainnya yang sangatlah penting yang harus dipertanyakan saat melakukan pembahasan berita tentang terorisme. Moduse operandi yang dilakukan mulai mengalami perkembangan pada abad ke-21 diakibatkan karena semakin majunya teknologi elektronik, komunikasi, transportasi dan juga berkembangnya ilmu tentang pengetahuan di bidang kimiawi.

Peristiwa yang tragedy 11 September 2001 yang menjadi saksi dimana ada dua pesawat komersial amerika serikat yang menabrak gedung kembar world trade center dan dimana salah satu pesawat yang lain menabrak pentagon, gedung yang menjadi pusat pertahanan Negara amerika serikat tersebut mengakibatkan ribuan warga amerika meninggal da nada yang luka-luka sehingga public dunia tertarik pada peristiwa ini dan amerika serikat marah. Ada beberapa upaya terhadap peristiwa tersebut penahanan dan pengadilan dilakukan kepada sebagian individu dan kelompok yang ada di Negara-negara asia tenggara termasuk Indonesia atas tuduhan persekongkolan dalam pergerakan

terorisme. Hal ini juga membuktikan bahwa kelompok tersebut memiliki hubungan yang rasional antar satu kelompok dan kelompok yang lain dan kelompok-kelompok yang radikal internasional (Hidayat Chusnul Chotimah, 2016. 189-190).

Politik Identitas Terhadap Dinamika Penduduk

Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas, agama, serta ideologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan dalam membangun politik bargaining. Yang di jelaskan pada setiap kesempatan. Akan tetapi target para pelaku lokal telah di anggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai tujuan ekonomi, politik. Yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya suatu politik identitas dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di era reformasi membuat mantapnya kedudukan pelaku lokal atas kekuasaan di arena politik lokal. Praktek politik didesentralisasi mendajikan berita etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas di pengaruhi oleh faktor struktural, dimensi politik utamanya, ketidaksinambungan politik dan etnis.

Menurut suatu wilayah satuan keturunan yang disebut sebagai suku dalam sejarah perkembangan masyarakat berdasarkan keturunan yang di kenal. Pembagian wilayah kekuasaan yang di kontrol oleh belanda memberi kekuasaan antara bukti terhadap penguasaan tanah, pola hubungan sosial yang kemudian diatas namakan kepada kedua masyarakat melalui ungkapan *urang ukan*. Dalam etnis cenderung dijadikan sebagai legitimasi politik untuk meraih kekuasaan, kelompok yang tergabung secara struktural dimanfaatkan oleh pelaku lokal guna mencapai kekuasaan melalui proses politik yang cenderung memobilisasi jaringan melalui identitas yang diciptakan untuk memenangkan pertarungan.

Politik yang mengarah pada etnis cenderung dijadikan sebagai alat oleh pelaku diarena politik untuk mencapai kekuasaan secara struktural dimanfaatkan pelaku lokal guna mencapai kekuasaan melalui identitas etnis serta diciptakan untuk memenangkan pertarungan. Politik identitas dijadikan alat untuk legitimasi politik, ditingkat supra desa. Politik identitas di supra desa menunjukkan bahwa hubungan kepentingan politik diciptakan oleh pelaku di akuisisi oleh kekuatan modal seperti ekonomi,

politik, sosial dan budaya yang meahirkan pelaku politik. Dalam penguasaan aset dan sumberdaya, pembagian kekuasaan, hingga pembangunan pedesaan. Kekuasaan politik di supra desa telah menjadi mekanisme baru pencirian keuntungan bagi pelaku tertentu yang dikenal dengan istilah *rent seeking* (Saradi watna, Rilus A. kinseng, dan sofyan sjaf, 2018. 80-83).

KESIMPULAN

Sistem demokrasi semakin mengalami peningkatan yang cukup drastis karena dimaklumi dari berbagai pihak pemerintahan di Indonesia, justru kenyataannya pemerintahan tidak selalu memberikan keadilan pada masyarakat. Dalam hal ini digunakan untuk menjadi penjamin hak yang seharusnya dimiliki warga Negara, jadi setiap individu memiliki kebebasan didalamnya. Pada dasarnya Indonesia terus bertahan dengan perbedaan tentang keanekaragaman yang dapat mengakibatkan suatu kelompok mengalami perpecahan.

Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berada di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun. Baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam setudi pasca kolonial , pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau di geluti sejak lama. Budaya politik lokal yang sekarang berkembang di Indonesia merupakan warisan sosial yang sudah terbentuk sejak berjalanya sejarah di Indonesia. Budaya terbentuk dari beberapa bagian yaitu kepercayaan, kebiasaan, dan struktur soial yang berkesinam bungan dengan kehidupan politik masyarakat. Adapun batasan terdapat dalam budaya tersebut dapat berasal dari agama, adat istiadat dan juga norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Budaya tersebut juga dapat dilihat dari condongnya perilaku masyarakat pada kehidupan politik di dalam masyarakat tersebut.

Kebangkitan politik identitas Islam melalui beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, mengargumentasikan primordialisme untuk melihat fenomena agama yang terdapat di dalam kategori sosio-biologis. Dalam pandangan ini di jelaskan bahwa suatu kelompok sosial dikarakteristikan oleh wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang tidak bisa di bantah. Sedangkan secara

konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas.

Dalam permasalahan demokrasi harus memperhatikan beberapa faktor yang memiliki keterkaitan dengan faktor ekonomi yang ikut mempengaruhi berjalanya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejarah nusantara agama islam menjadi mayoritas yang diyakini penduduk Indonesia yang dibawa oleh pedagang arab pada tujuh masehi setelah Indonesia dikuasai india di abad pertama masehi. Kedatangan pedagang india dan arab ke Indonesia yang menjadi pemicu pertama padatnya penduduk di Indonesia dan sampai saat ini semakin berkembang Politisme agama sebagai sebuah fenomena politik pasca-kebenaran: antara Populisme, Distorsi, informasi, dan legitimasi. Pada realitas populistik tidak mungkin jauh dari era pasca-kebenaran. Pembahasan yang dibuat dalam kompetisi politik digambarkan adanya berita-berita tentang menjunjung tinggi hak masyarakat. Jansen (2015) berpendapat bahwa perilaku individu yang menjunjung tinggi hak adalah integritas politik didalamnya ada tokoh-tokoh politik dapat mengarahkan integritas sosial yang tersisihkan lalu menciptakan integritas yang bisa secara giat melaksanakan praktik politik benar adanya dan perdebatan. Dalam hal ini komponen penting yang menjunjung tinggi yaitu mengarahkan dan terkait.

Kebangkitan politik identitas islam pada arena pemilihan gubernur Jakarta Momentum pilkada yang berada di Jakarta telah memperlihatkan beberapa berita yang berkaitan dengan kampanye yang mana kampanye tersebut menguras energi bangsa bukan hanya publik Jakarta akan tetapi juga melibatkan masyarakat Indonesia, diantaranya kasus yang berkaitan dengan surah Al Maidah ayat 51 yaitu pada sebuah organisasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia datang ke Jakarta untuk melakukan aksi demo, karena adanya opini yang mengatakan bahwa 'Saya Muslim, saya memilih pemimpin yang muslim'.

Orang muslim pada saat itu menjadi pusat perhatian karena orang muslim memilih pemimpin harus muslim. Orang muslim tersebut akhirnya menjadi salah satu orang yang sedang menjadi tema perbincangan di publik dalam pemilihan gubernur Jakarta yang di umumkan di setiap jumat dan juga pada berbagai kegiatan keagamaan. Akhirnya banyak kalangan yang memberi kesimpulan bahwasanya Indonesia mengalami konflik baru diantaranya negara dan agama, yang utama berkaca pada tingginya politik dalam pemilihan gubernur di Jakarta.

Identitas nasional sebagai pertimbangan politik Indonesia dalam merespon aksi terorisisme Berita terorisme pada saat ini semakin mengalami perluasan tidak hanya satu Negara tetapi sampai mancan Negara yang membuat penyebaran teroris semakin berkembang pesat lalu menjadi peristiwa global. Penyebab dari peristiwa ini karena adanya masa globalisasi yang mengakibatkan modal, aliran dan para masyarakat mengalami percepatan dalam jaringan teroris. Dalam globalisasi bukan hanya membahas tentang mobilitas barang dan masyarakat saja tetapi membahas tentang pemikiran atau ide baru. Arus globalisasi juga membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mendorong perkumpulan orang bahkan individual untuk mengikuti pemanfaatan keadaan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas, agama, serta ideologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan dalam membangun politik bargaining. Yang di jelaskan pada setiap kesempatan. Akan tetapi target para pelaku lokal telah di anggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai tujuan ekonomi, politik. Yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya suatu politik identitas dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di era reformasi membuat mantapnya kedudukan pelaku lokal atas kekuasaan di arena politik lokal. Praktek politik didesentralisasi mendajikan berita etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas di pengaruhi oleh faktor struktural, dimensi politik utamanya, ketidaksinambungan politik dan etnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Tatu. 2018. *"Identitas Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2009"*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- Lestari, Yeni Sri. 2018. *"Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama"*. Jurnal Of Politics and Policy. Vol. 1.
- Zahrotunnimah. 2018. *Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia*. Vol. 2.

- Fikri, M. Sirajudin, Nico Oktario A. *"Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal. Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam"*. Vol. 1053
- Sari, Endang. 2016. *"Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik."* Vol. 7.
- Sri Astuti Buchari. 2014. *"Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas"*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hanifiya. 2018. *"Politik Identitas dan Representasi Politik. Jurnal Studi Agama-Agama"* Vol. 1.
- Kurniawan, Budi. 2018. *"Polittisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi."* Jurnal Sosiologi Agama. Vol. 12.
- Chotimah, Hidayat Chusnul. 2016. *"Identitas Nasional dan Normalitas Internasional sebagai Pertimbangan politik Indonesia dalam Merespon Saksi dan Jaringan Terorisme Global. Jurnal Politica"*. Vol. 7.
- Kontona, Saradi dkk. 2018. *"Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat. Jurnal Sosiologi Pedesaan"*. Vol. 6.
- Sukamto, 2010. *Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi "Lokalitas dan Globalisasi")*. Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang. Vol.2
- Habibi, Muhammad. 2019. *"Analisis Politik Di Indonesia"*. Jurnal Sosial Politik Universitas Mulawarman.
- Chusniyah, Tutut. 2016. *Pengaruh Identitas Nasional, Etnis, dan Agama Terhadap Multikulturalisme dalam Menghadapi Globalisasi di Indonesia. [Http://fppsi.um.ac.id](http://fppsi.um.ac.id)*. Vol.8, No.2. Diakses pada tanggal 18 Mei pukul 15.34